

EKSEKUTIF

ISSN : 2337 - 5736

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan

Volume 1 No. 1 Tahun 2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi

PERAN PEMERINTAH DALAM MEMINIMALISIR GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT DI KELURAHAN LEWET KECAMATAN AMURANG KABUPATEN MINAHASA SELATAN

*Windy Valentine Gahansa¹**Michael Mantiri²**Josef Kairupan³*

Abstrak

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab, Peran pemerintah, polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberikan pelayanan, dan menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif diharapkan dapat lebih mengeksplorasi masalah sehingga dapat diperoleh jawaban terhadap masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat sekelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat, selanjutnya Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Desa, Pelayanan Publik.

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam hal menghadapi ancaman dan perubahan tuntutan dan dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik dalam negeri dan globalisasi membawa implikasi dalam segala kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka menciptakan dan mempertahankan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat adalah kemungkinan menghadapi konflik regional, dan pengaruh negatif dari luar semakin terbuka dikarenakan era globalisasi dan keterbukaan diberbagai bidang kehidupan, sehingga kesadaran bela Negara dan wawasan kebangsaan perlu ditingkatkan dan dipahami oleh semua komponen masyarakat secara lebih efektif dan efisien.

Semua bentuk pelanggaran keamanan dan ketertiban cenderung disebabkan karena terjadinya persaingan yang semakin ketat antar warga masyarakat dalam upaya memenuhi hidupnya. Tindakan yang melanggar aturan seolah-olah menjadi suatu hal yang patut dan wajar untuk dilakukan. Upaya penertiban yang dilakukan aparat penegak hukum dan pemerintah kadang-kadang menjadi kurang berdaya karena kondisi dilematis, baik akibat substansi permasalahan baik dari segi aparatnya, termasuk masalah keamanan dan ketertiban. Kabupaten Minahasa Selatan sebagai salah satu daerah otonom yang mempunyai sumber daya manusia yang cukup potensial dituntut untuk meningkatkan kemampuan individu

aparatnya untuk menunjang pelaksanaan Otonomi daerah yang didukung oleh kemampuan aparat pemerintah, yang mana kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan nasional tersebut tergantung pada kesempurnaan pemerintah, dimana dalam mengemban tugas kewilayahan tugas dan fungsi lurah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 129 ayat (4) dijabarkan beberapa tugas lurah adalah melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk itu lurah mampu mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi, kemudian melakukan pembinaan dan pengawasan, dan setelah itu melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum yang ada di kelurahan.

Masalah pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Kelurahan Lewet Kecamatan Amurang berdasarkan pengamatan awal peneliti ditemukan masih adanya keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat. Secara umum Kelurahan Lewet terdiri dari 6 Lingkungan yang dipimpin oleh masing-masing kepala lingkungan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 439 (empat ratus tiga puluh sembilan) yang terdiri dari berbagai macam profesi pekerjaan dan tingkat perekonomian. Fenomena yang ditemui berkaitan dengan gangguan keamanan

dan ketertiban sering didominasi oleh para remaja pada rentang umur 13 sampai 17 tahun, gangguan keamanan yang sering dilakukan oleh remaja tersebut adalah meneguk minuman keras sampai mabuk, berkelahi, balapan motor liar dengan menggunakan knalpot racing yang keras suaranya, bahkan sampai pada pencurian. Beberapa kejadian gangguan keamanan dan ketertiban sering terjadi pada saat ada acara-acara suka maupun duka, dimana para remaja tersebut mengkonsumsi miras secara berlebihan sehingga tidak dapat terkontrol lagi. Gangguan keamanan dan ketertiban yang sering dilakukan para remaja tidak memandang strata sosial dan tingkat perekonomian, ditemukan ada beberapa anak remaja yang berasal dari keluarga dengan perekonomian baik bahkan yang dari kalangan keluarga kurang mampu turut terlibat dalam membuat keonaran yang mengganggu rasa aman di masyarakat. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji secara ilmiah mengenai permasalahan peran pemerintah, baik itu pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan dan pemerintah lingkungan berkoordinasi dengan pihak keamanan yaitu Polri dalam mengatasi gangguan kantibmas di wilayah, khususnya di kelurahan Lewet.

Gangguan keamanan dan tingkat kejahatan secara umum masih dalam tingkat terkendali akan tetapi terdapat perkembangan kejahatan dan kekerasan yang cukup merasahkan masyarakat dan berakibat pudarnya rasa aman masyarakat. Perkembangan pesatnya kejahatan yang belum dapat diimbangi dengan penuntasan penegakkan hukum oleh penegak hukum dan pemerintah

turut memancing perasaan ketidakadilan di masyarakat yang pada akhirnya melemahkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah secara keseluruhan, hal ini mengakibatkan melemahnya kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum. Kepatuhan dan disiplin masyarakat terhadap hukum merupakan tantangan dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Berbagai upaya secara komprehensif telah dilakukan baik oleh pemerintah kelurahan maupun aparat penegak hukum untuk meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh para remaja, begitu pula upaya yang dilakukan oleh tokoh agama, tokoh masyarakat dan para orang tua, namun upaya penanganan tersebut dianggap masih belum memberikan efek jera kepada pelaku, hal ini dibuktikan dengan masih berulangnya keonaran yang dilakukan oleh remaja yang sama bahkan remaja yang lain dimana sebelumnya tidak terlibat, dengan demikian dapat diindikasikan bahwa ada upaya dari remaja itu sendiri untuk memprovokasi dan mengajak teman remaja yang lainnya yang sebelumnya tidak terlibat untuk turut terlibat dalam keonaran tersebut.

Tinjauan Pustaka

Setiap individu dalam masyarakat memiliki sumbangsih penting dalam sistem masyarakat setempat. Individu tersebut kemudian membentuk sub sistem sebagai fondasi dari sistem yang ada. Individu dalam masyarakat tentunya memiliki peran yang berbeda-beda antar satu sama lain tergantung dari tuntutan sistem yang memaksa individu tersebut bertindak dan menunjukkan peran. Dalam kehidupan

manusia dan hubungannya dalam kelompok tertentu sering kali dibarengi dengan tindakan interaksi yang berpola, baik resmi maupun yang tidak resmi. Sistem pola resmi yang dianut warga suatu masyarakat untuk berinteraksi dalam sosiologi dan antropologi disebut pranata. Orang yang bertindak dalam pranata tersebut biasanya menganggap dirinya menempati suatu kedudukan sosial tertentu, tindakan tersebut dibentuk oleh norma-norma yang mengatur. Kedudukan (status) menjadi bagian penting dalam setiap upaya untuk menganalisa masyarakat. Tingkah laku seseorang yang memainkan suatu kedudukan tertentu itulah yang disebut sebagai peranan sosial (Koentjaraningrat, 2006:136). Peranan berarti tidak bisa dipisahkan dari kedudukan, eratnya kaitan bagi keduanya. Status tertentu akan membutuhkan peran tertentu. Semakin berat peran yang dimainkan maka semakin tinggi pula statusnya dalam masyarakat. Dan sebaliknya bila semakin minim peran yang dilakukan maka semakin rendah pula kedudukan atau statusnya dalam masyarakat. Menurut Robert M.Z. Lawang, peran diartikan sebagai suatu pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status atau posisi tertentu dalam organisasi (Robert,2005:89). Peranan terkadang pula diikuti oleh tuntutan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada individu yang menempati status tertentu. Pengharapan masyarakat pada status tertentu langsung maupun tidak memberikan beban bagi pelaksana peran yang dimaksud. Mengutip J.J Rosseau dengan teori kontrak sosialnya. Tugas dari peran yang diemban oleh individu merupakan hasil kontrak

dengan masyarakat yang telah memberikan wewenang itu dengan kontrak yang telah disepakati melalui mekanisme yang telah disepakati pula. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimanakah masyarakat menentukan harapan-harapannya terhadap para pemegang peran tersebut (Robert,2005:90).

Peranan sebagai pemerintah dapat diartikan sebagai harapan-harapan dari seluruh masyarakat pada sebuah wilayah, para pejabat publik dibawahnya, para aparatur hingga tingkatan terendah dan kelompok lain yang punya pengaruh yang berarti sebagai generalised other bagi peranan pemerintah tersebut. Setiap kelompok ini merupakan kelompok referensi bagi pemerintah tersebut dan ia memperhitungkan harapan-harapan dari tiap kelompok dalam menjalankan peranannya.

Berangkat dari kebutuhan individu dalam sebuah sistem sosial, baik yang bersifat primer maupun yang bersifat sekunder. Pemenuhan kebutuhan tersebut menjadikan setiap individu untuk mencari cara dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Terkadang ada beberapa diantara pemenuhan kebutuhan yang perlu melibatkan individu yang lain. Selain itu, ada juga dari kebutuhan-kebutuhan tersebut justru bersinggungan dengan kebutuhan individu yang lain. Muncullah kemudian sebuah solusi dalam peradaban kehidupan manusia untuk membentuk sebuah kelompok yang diakui untuk membantu proses pemenuhan kebutuhan. Persinggungan dalam kebutuhan antar individu maupun proses pemenuhannya diharapkan juga mampu menyelesaikan konflik dalam pemenuhan kebutuhan ini.

Masyarakat kemudian menyebutnya Pemerintah. Pemerintah kemudian menjadi gejala yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat pada mulanya. Masyarakat sebagai suatu gabungan dari sistem sosial, senantiasa menyangkut dengan unsur-unsur pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti keselamatan, pakaian dan makanan kepada kelompok pemerintah ini. Dalam memenuhi kebutuhan dasar itu, manusia bekerja sama dan berkelompok dengan orang lain, dan bagi kebutuhan sekunder maka diperlukan bahasa untuk berkomunikasi menurut makna yang disepakati bersama, dan institusi sosial baru tersebut kemudian berlaku untuk menjalankan fungsi kontrol dalam aktivitas dan mengembangkan masyarakat tadi. Kebutuhan tersebut adalah kebutuhan untuk bekerjasama, menyelesaikan konflik, dan interaksi antar sesama warga masyarakat.

Pemerintah kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kegiatan bekerja sama maupun kegiatan pemenuhan kebutuhan. Lalu bagaimana sebuah kelompok kontrol tersebut dibentuk? Mengutip Rosseau (2007:15), "Membentuk institusi-institusi tersebut, masyarakat membuat kesepakatan atau perjanjian diantara mereka". Adanya kesepakatan yang kemudian dikenal dengan sebutan kontrak sosial (social contract) tersebut kemudian diberikan kekuasaan legal dengan mekanisme beragam seperti yang kita kenal sekarang semisal pemilihan umum yang selanjutnya melahirkan kekuasaan dan institusi pemerintahan.

Kebutuhan terhadap pemerintahan pada beberapa kondisi selain untuk membantu pemenuhan kebutuhan juga

dijadikan sebagai institusi yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut terhindar dari benturan yang melibatkan antar individu di dalamnya. Masuknya zaman modern semakin menguatkan peran pemerintah untuk tidak hanya menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Meningkatnya kebutuhan masyarakat membuat peran pemerintah perlahan juga untuk menjadi pelayan masyarakat.

Tetap pada kontrak sosial, pemerintah pada hakekatnya dibentuk oleh masyarakat oleh karena itu sangatlah tidak pantas bila pemerintah hanya melayani diri sendiri, melainkan juga harus melayani masyarakat sebagai pemberi mandat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama Lihat (Ryas Rasyid,2009:10).

Dengan begitu kelahiran pemerintahan membawa pelajaran bahwa kehadirannya merupakan perwujudan kehendak masyarakat yang menyetujui secara bersama tentang kepentingan bersama mereka untuk diatur oleh pemerintah mandataris rakyat. Dari situ pemerintahan bisa mencakup mengenai bagaimana sebuah pelayanan masyarakat dikelola dan karena mencakup kepercayaan masyarakat sebagai manusia, maka nilai kemanusiaan wajib dimiliki oleh pemerintah.

Pelayanan oleh pemerintah tentunya memerlukan cara untuk menyalurkan pelayanan tersebut, karenanya pemerintah juga sepatutnya memahami cara pendekatan kepada masyarakat dalam proses distribusi pelayanan. Psikologi masyarakat pada sebuah

wilayah tentunya berbeda dan secara sosiologis pola pergaulan yang dicetak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tidak lepas pula dari corak psikis tersebut yang tentunya berangkat dari adat istiadat setempat.

Penggambaran diatas yang diawali dengan konsepsi pemerintahan ala Rousseau menjelaskan peran dan posisi masyarakat yang sebetulnya memegang penuh posisi yang telah dimandatkan kepada institusi pemerintahan, yang mana bangunan komitmen tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu memang diperlukan untuk melindungi, memberdayakan dan mensejahterakan rakyat. Ndraha (2005:115) mengatakan bahwa pemerintah memegang pertanggungjawaban atas kepentingan rakyat. Dalam bukunya *kybernology 1* Ndraha juga mengatakan bahwa pemerintah adalah semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan civil. Pendahuluan kepentingan umum yang telah ditekankan pada paragraf sebelumnya tak lain sebagai upaya untuk memberikan kepuasan kepada publik, melalui kekuasaan yang telah dimandatkan maka tugas mengatur bagi pemerintah seyogyanya telah dijalankan.

Ketentraman dan ketertiban berasal dari kata dasar “tentram”, dan “tertib” yang pengertiannya menurut Suradinata Ermaya (2005:65) tentram ialah aman atau (tidak rusuh, tidak dalam kekacauan) misalnya didaerah yang aman, orang-orang bekerja dengan senang, tenang (tidak gelisah, tenang hati, pikiran) misalnya baru merasa tentram hatinya artinya keamanan, ketenangan, (pikiran). Selanjutnya tertib

ialah aturan, peraturan yang baik, misalnya tertib acara aturan dalam sidang (rapat dan sebagainya), acara program, tertib hukum yaitu aturan yang bertalian hukum. Ketertiban artinya aturan peraturan, kesopanan, perikelakuan yang baik dalam pergaulan, keadaan serta teratur baik. Berdasarkan kedua pengetahuan diatas terdapat keterkaitan yang erat dimana dengan adanya rasa aman, masyarakat merasa tenang maka timbullah masyarakat yang tertib hukum dengan segala peraturan yang berlaku dan begitu pula sebaliknya dengan adanya sikap tertib dengan adanya sikap tertib terhadap suatu dimana saling menghormati peraturan yang ada, saling mengerti posisi masing-masing, maka masyarakat dapat merasa aman secara jasmani dan praksis, damai dan tenang tanpa adanya gangguan apapun itulah yang disebut terciptanya suasana tentram.

Menurut J.S Badudu dan Z.M Zain (dalam Umar, Husain. 2011:73) mendefinisikan bahwa ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan, keadaan teratur misalnya ketertiban selalu harus di jaga demi kelancaran pekerjaan. Berdasarkan definisi tersebut pada dasarnya ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan yang aman dan teratur, tidak datang kerusakan dan kekacauan sehingga daerah-daerah dan orang-orang didaerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku menyebabkan terciptanya kelancaran pekerjaan. Pengertian Kemanan dan ketertiban menurut Ermaya Suradinata (2005:66), bahwa ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman,

tertib, dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

Secara umum keamanan adalah status seseorang dalam keadaan aman, kondisi yang terlindungi secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politik, emosi, pekerjaan, psikologis atau berbagai akibat dari sebuah kegagalan, kerusakan, kecelakaan, atau berbagai keadaan yang tidak diinginkan. Menurut Craven keamanan tidak hanya mencegah rasa sakit dan cedera tetapi juga membuat individu merasa aman dalam aktifitasnya. Keamanan dapat mengurangi stres.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan dasar penelitian survey. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif yang berakar dari 'paradigma interpretatif' pada awalnya muncul ketidakpuasan dari 'paradigma positivist' yang menjadi akar penelitian kuantitatif (Sutina dan Suyanto Bagong, 2005:23). Pembicaraan mengenai penelitian kualitatif tidak dapat terlepas dari pembicaraan mengenai pendekatan yang melatarbelakangi penelitian kualitatif. Untuk dapat memahami penelitian kualitatif tidaklah cukup hanya sekedar membicarakan mengenai,

metode/cara untuk melakukan suatu penelitian. Oleh karena itu, sebelum membicarakan mengenai bagaimana metode dan prosedur melakukan suatu penelitian kualitatif perlu untuk terlebih dahulu memahami teori dan pendekatan yang melatar belakangi metode penelitian kualitatif.

Dalam rangka memudahkan proses penelitian terhadap analisis data yang diperoleh, maka fokus penelitian ini adalah analisis peran pemerintah dalam meminimalisir gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, dengan menggunakan konsep Soerjono Soekanto (2007:213-214) yang mengkaji peran pemerintah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia aparatur pemerintah, antara lain: Kesiapan, Rekrutmen, Pengembangan dan kemampuan
2. Penyediaan sarana dan prasarana (poskamling dan lain sebagainya)
3. Strategi

Informan yang dipilih adalah yang dianggap relevan dalam memberikan informasi. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

1. Lurah 1 orang
2. Kepala-kepala Lingkungan 6 orang
3. Hansip 12 orang
4. Tokoh Masyarakat 3 orang
5. Tokoh Agama 2 orang

Hasil Penelitian

Dewasa ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak

kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakatnya mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Paradigma penyelenggaraan Pemerintah telah terjadi pergeseran dari paradigm rule governance yang senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma Good Governance dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada Pemerintah atau Negara saja tapi harus melibatkan seluruh elemen, baik didalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi public (masyarakat).

Lurah sebagai pemimpin formal yang langsung berhadapan dengan masyarakat, melaksanakan teknis administrasi Pemerintahan dan tugas pembangunan di kelurahan. Maka dari itu kemampuan seorang lurah dalam memimpin kelurahan sangat diperlukan guna menggali dan mengembangkan potensi serta memberdayakan masyarakatnya sehingga dengan demikian diharapkan agar pembangunan yang dikehendaki oleh

pemerintah dan diperlukan oleh masyarakat dapat tercapai dengan baik. Dewasa ini, masalah keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kebutuhan dasar yang senantiasa diharapkan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Oleh karenanya, masyarakat sangat mendambakan adanya keyakinan akan aman dari segala bentuk perbuatan, tindakan dan intimidasi yang mengarah dan menimbulkan hal-hal yang akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan oleh perorangan dan atau pihak-pihak tertentu lainnya.

Adanya rasa aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat akan dapat menciptakan kehidupan yang harmonis di kalangan masyarakat dan yang tidak kalah pentingnya akan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Sebaliknya apabila kondisi strata masyarakat dihadapkan pada kondisi tidak aman akan mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat yang pada gilirannya pemenuhan taraf hidup akan terganggu pula.

Interaksi komunikasi yang terjadi dalam masyarakat melibatkan berbagai aspek misalnya pendidikan, kebudayaan, keagamaan, kesehatan dan lain-lain. Khususnya tindakan keamanan, ketentraman dan ketertiban yang dapat menimbulkan masalah sosial di masyarakat. Masalah sosial hal keamanan pada dasarnya merupakan masalah semua manusia. Karena tidak ada satu manusia pun yang dapat terbebas dari penyakit sosial ini. Namun, terkadang ada beberapa orang yang kurang memperhatikan keamanan sehingga menimbulkan berbagai

masalah yang timbul bagi dirinya maupun orang lain disekitarnya. Masalah K3 juga dapat timbul dari faktor ketentraman (agent) yang dapat menyebabkan seseorang menjadi terteram. Oleh karena itu, diperlukan tenaga ahli dalam bidang K3, yang dapat membawa masyarakat ke hidup yang lebih aman.

Masyarakat yang melakukan kerjasama dengan pihak berkepentingan yakni organisasi Sandi Bhayangkara dalam meningkatkan komunikasi dengan masyarakat terdapat masalah yang mendasar yakni segi anggaran yang telah disediakan pihak Kelurahan sehingga proses komunikasi ini dilakukan secara bertahap dan tidak intensif, ini berarti proses komunikasi hanya bersifat tindakan saja bukan bersifat pencegahan karena komunikasi yang diberikan ke masyarakat di lingkungan Kelurahan Lewet masih menyesuaikan kondisi dan situasi yang ada.

Prinsip yang kedua menyatakan bahwa setiap perilaku memiliki potensi komunikasi khususnya Lurah Lewet. Dalam bidang K3, seorang aparatur harus paham dengan apa yang dilakukan masyarakat, karena mereka memiliki body language. Misalnya, disaat menyampaikan informasi kondisi seseatu, seorang aparatur harus dapat melihat respon mereka. Apakah mereka senyum, atau diam saja, atau malah menunjukkan muka yang kurang sedap. Dengan demikian dapat diketahui tindakan apa yang dapat dilakukan. Misalnya jika respon audience hanya diam saja atau menunjukkan respon yang kurang baik seperti menggerutu, bicara sendiri atau memandang dengan tatapan sinis, mungkin cara penyampaian informasi harus diubah.

Menjadi lebih menarik dan menyenangkan sehingga penyampaian informasi menjadi lebih efektif.

Prinsip yang selanjutnya menyatakan bahwa komunikasi memiliki dimensi isi dan hubungan. Hal ini berhubungan dengan bagaimana cara menyampaikan suatu pesan. Ada kalanya satu pesan artinya sama, namun karena cara menyampaikannya berbeda, pesan tersebut dimaknakan berbeda pula. Contohnya dalam bidang K3 adalah proses penyampaian informasi kondisi lapangan kepada anak kecil dan orang dewasa. Seorang aparatur harus dapat membedakan pesan kepada anak kecil dan orang dewasa. Misalnya, “adek, jangan buang sampah sembarangan”, akan berbeda artinya dengan, “bapak, jangan buang sampah sembarangan”. Anak kecil akan menanggapi perkataan itu mungkin dengan biasa saja dan mengikuti perintah tersebut yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Namun, orang dewasa atau bapak-bapak akan menanggapi pesan itu mungkin dengan perasaan negatif. Mungkin merasa dirinya dianggap kurang disiplin dan dianggap seperti anak kecil. Sehingga si penyampai informasi tersebut akan dianggap kurang sopan. Dengan demikian, seorang aparatur harus memperhatikan cara penyampaian pesan. Jangan sampai menimbulkan salah persepsi pada masyarakat.

Komunikasi juga berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Hal ini juga termasuk dalam prinsip komunikasi. Kadang seseorang bermaksud untuk tidak melakukan komunikasi, namun orang lain menganggapnya melakukan komunikasi. Inilah yang dimaksud komunikasi yang tidak disengaja. Sedangkan komunikasi yang

disengaja, merupakan komunikasi yang real, dimana adanya timbal balik yang jelas antara komunikator dan komunikan. Prinsip ini juga penting dalam bidang K3 Kelurahan Lewet. Misalnya, seorang Lurah atau aparatur Kelurahan ialah menjalankan kegiatan “sebelum makan selalu mencuci tangan”. Dan hal tersebut diamati oleh seorang masyarakat yang kebetulan memang memiliki hubungan yang dekat. Pada awalnya, kegiatan mencuci tangan ini merupakan bentuk rutinitas yang memang sudah biasa dilakukan sang aparatur Kelurahan. Namun tanpa sengaja, masyarakat yang mengamatinya menjadi terpengaruh untuk meniru kegiatan tersebut. Dengan demikian, hendaknya kesengajaan ini terjadi dalam hal-hal positif yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Keseluruhan elemen penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban berjalan dengan sebagaimana mestinya namun proses dalam peningkatan komunikasi politik melalui agenda yang telah ditetapkan masih dilakukan secara bertahap dan tidak intensif (terjadwal dan dilakukan) karena anggaran untuk penyelenggaraan komunikasi ke masyarakat masih minim sehingga diperlukan adanya bantuan dari pihak-pihak yang berkepentingan demi menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kelurahan Lewet.

Menjaga hubungan dengan beberapa pihak berkepentingan seperti pihak swasta, pihak pendidikan, pihak keamanan, pihak pemerintahan serta pihak organisasi masyarakat yang peduli terhadap ketentraman dan ketertiban dalam suatu wilayah di Kelurahan Lewet. Sebagai bentuk kepedulian antar pemerintahan

Kelurahan Lewet dan Organisasi Masyarakat serta hubungan dengan seluruh lapisan masyarakat. Peran Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kerjanya, secara garis besar Lurah mempunyai peran yang sangat penting yakni melaksanakan pembinaan urusan ketentraman dan ketertiban sesuai lingkup tugas dan kewenangannya, melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap petugas pelindung masyarakat di wilayah kelurahan dan melaksanakan pembinaan fasilitas terhadap upaya-upaya yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan.

Kesimpulan

1. Upaya penyediaan sumber daya manusia dan aparat keamanan yang ada di kelurahan, telah dilakukan dengan mengangkat hansip karena kekurangan tenaga hansip yang ada di setiap lingkungan se kelurahan Lewet serta memberikan pelatihan bagi setiap hansip.
2. Ditemui adanya kekurangan dimana keadaan poskamling tersebut hanya tersedia satu unit, dan belum dapat menjangkau wilayah yang ada di kelurahan Lewet, karena poskamling yang ada di tiap lingkungan tidak efektif, karena hanya bertempat di rumah kepala lingkungan.
3. Pemerintah kelurahan dan tokoh masyarakat se kelurahan bekerja sama melakukan pembinaan-pembinaan kepada setiap lapisan masyarakat tentang perlunya

keamanan dan ketertiban dalam hidup bermasyarakat.

Saran

1. Perlu ditambahkan personil hansip serta penambahan honor bagi setiap hansip yang ada di kelurahan Lewet
2. Perlu adanya tambahan poskamling serta bantuan penyertaan modal dari pemerintah untuk membangun poskamling tanpa menunggu swadaya dari masyarakat
3. Perlu adanya pelatihan khusus buat pemerintah kelurahan beserta toko-toko masyarakat tentang pentingnya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan kelurahan dan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, B. A. Sacbani. 2009. Metodolgi Penelitian Kualitatif. Bandung : Pustaka Setia.
- Bayu Suryaningrat. 2010. Mengenal Ilmu Pemerintahan. PT.Rineka Cipta.Jakarta.
- Inu Kencana. 2007. Ilmu Politik.Penerbit Rineka Cipta.Jakarta.
- Indar Arifin. 2010. Birokrasi Pemerintahan dan Perubahan Sosial Politik. Pustaka Refleksi.Makassar.
- Jean Jacques Rousseau. 2007. Kontrak Sosial, Terjemahan Sumarjo.Erlangga. Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Keempat, 2008. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Koentjaraningrat. 2006. Pengantar Antropologi I, Cetakan ke-5. Rineka Cipta. Jakarta.
- Levinso dan Soekanto. 2009:213. Peranan, Edisi Baru Rajawali Pers. Jakarta.
- Robert M Z. 2005. Pengantar Sosiologi. PT. Karunika. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Ryas Rasyid.2009. Makna Pemerintahan ditinjau dari Segi Etika dan Kepemimpinan.PT. Yarsif Watampone.
- Suradinata Ermaya, 2005, Manajemen Sumber Daya Manusia, Ramadhan. Bandung
- Sutina dan Suyanto Bagong.2005. Metode Penelitian Sosial.Alfabeta. Jakarta.
- Sujarweni, W. V. 2014. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: PB Pustaka BaruPers.
- Soekanto Soerjono. 2007. Sosiologi Suatu Pengantar. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soekanto, S. 2009. Peranan Sosiologi Suatu Pengantar. Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.
- Talidziduhu Ndraha. 2005. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru). Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- Tjokrowinoto, Moejiarto. 2007. Pembangunan Dilema dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Umar Husain. 2011. Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi.PT. Gramedia Pustaka Umum. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.